



# Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo

Andi Patotori Arismunandar<sup>1</sup>, Ahmad Irza Muhafidz<sup>2\*</sup>, Bakri Bakri<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Puangrimaggalatung, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Puangrimaggalatung, Maddukelleng, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: [uniprima@gmail.com](mailto:uniprima@gmail.com)\*

**Abstract.** *Background of this research, based on observations, highlights the high public demand for transparency and accountability in providing information, as well as the community's desire to participate in the planning and implementation of social programs, which are often overlooked. The purpose of this study is to examine the effect of good governance on organizational performance at the Office of Social Services, Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection in Wajo Regency. This research adopts a survey method, where data is collected from all members of the population as the sample, totaling 65 respondents. The primary data collection technique involves questionnaires, supported by observation and documentation. The data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. The findings indicate a positive impact of implementing good governance on the organizational performance of the aforementioned office.*

**Keywords:** *Good Governance, Organizational Performance, Social Services Office*

**Abstrak.** Latar belakang penelitian ini, sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan yaitu tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi, akuntabilitas dalam memberikan informasi, serta tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial yang sering kali diabaikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Pnduduk Keluara Berencan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah survey, yaitu penelitian yang sumber datanya adalah seluruh anggota populasi diajdikan sampel, dengan teknik pengumpulan data utama yaitu kuisoiner, sampel pada penelitian ini sebanyak 65 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kuantitatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja organisasi pada kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Pemerintahan yang Baik, Kinerja Organisasi, Kantor Dinas Sosial

## 1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, *good governance* menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini menuntut keseimbangan peran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan restrukturisasi birokrasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mencakup aspek sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta peran dan tugas masing-masing (Serdamayanti, 2011).

Penataan kelembagaan diperlukan agar organisasi perangkat daerah lebih efektif. Menurut Delly (2013), pedoman pengorganisasian perangkat daerah tidak bertujuan untuk keseragaman, tetapi untuk menciptakan aturan yang memudahkan pembinaan dan pengawasan.

Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pengendalian organisasi berdasarkan kebutuhan daerah.

Secara teoritis, good governance berarti pengelolaan kekuasaan berdasarkan hukum, kebijakan transparan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Kaloh, 2010). Pegawai sektor publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan transparan, berkualitas, dan pembagian tugas yang baik. Prinsip ini bertujuan mendorong pemerintahan demokratis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pegawai.

Good governance bukan konsep baru, melainkan telah lama berkembang dalam sejarah manusia, sebagaimana disebutkan oleh J.S. Endarlin (Setyawan, 2004). Governance menggantikan istilah government, merujuk pada penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola masalah kenegaraan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi memperbesar tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Kabupaten Wajo, kualitas kinerja Dinas Sosial P2KBP3A masih perlu ditingkatkan. Masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam perencanaan serta pelaksanaan program sosial. Tuntutan ini menjadi pengingat pentingnya penerapan prinsip good governance untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan memenuhi harapan masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Good Governance merujuk pada tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menekankan pada interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan kepentingan bersama. Governance mengacu pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Konsep ini mencakup nilai-nilai yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat serta berorientasi pada keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kemandirian masyarakat (Sedarmayanti, 2009).

Prinsip Good Governance meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Transparansi menciptakan arus informasi yang bebas dan mudah diakses, sedangkan partisipasi mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Efektivitas memastikan pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan masyarakat, sementara penegakan hukum menjaga kepastian layanan berdasarkan standar yang ditetapkan (UNDP, 1997; Sedarmayanti, 2009).

Kinerja organisasi mencerminkan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Hal ini melibatkan kerja sama anggota organisasi dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi sendiri adalah struktur yang terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja secara formal untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan organisasi diukur melalui keluaran (output), hasil, efisiensi, serta dampaknya terhadap masyarakat (Bastian, 2001; Sobandi, 2006).

Kinerja organisasi mencakup hasil kerja yang dicapai melalui proses tertentu, baik dalam bentuk layanan langsung (output) maupun efek jangka menengah (outcome). Efisiensi pengelolaan sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung pada kemampuan menyelaraskan usaha dengan hasil, yang dapat diukur melalui indikator seperti kualitas pelayanan, kepuasan publik, dan efektivitas program (Sobandi, 2006).

Kinerja organisasi dipengaruhi oleh teknologi, kualitas input, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, faktor internal seperti kemampuan individu dan motivasi kerja juga berperan besar. Motivasi yang positif terhadap situasi kerja mendorong kinerja yang lebih baik, sementara kondisi sebaliknya dapat menjadi penghambat (Ruky, 2001; Mangkunegara, 2006).

Indikator kinerja organisasi mencakup produktivitas, responsivitas, dan tanggung jawab. Produktivitas mengukur hubungan antara input dan output, sedangkan responsivitas menunjukkan kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab mengacu pada kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya (Dwiyanto, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo. Populasi sebanyak 65 orang yang terdiri dari 47 orang ASN dan 18 orang non ASN dan sampelnya 65 orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, angket, dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Deskripsi Distribusi Frekuensi Data Variabel Hasil penelitian

		Statistics	
		Good governance (X)	Kinerja organisasi (Y)
N	Valid	65	65
	Missing	0	0
Mean		44.4769	44.3538
Median		44.0000	44.0000
Mode		44.00	44.00
Std. Deviation		.50335	.57093
Variance		.253	.326
Range		1.00	2.00
Minimum		44.00	43.00
Maximum		45.00	45.00
Sum		2891.00	2883.00

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Wajo dengan nilai *valid* yang menunjukkan nilai 65 yang berarti terdapat 65 responden serta seluruh datanya terinput dengan baik, kemudian nilai *missing* yang menunjukkan 0. Sementara itu, *mean good governance* (X) menunjukkan 44,4769 dan untuk kinerja organisasi (Y) dengan nilai 44,3538, *median good governance* (X) dan kinerja organisasi yaitu 44,00, mode sebesar 44 dan nilai standar deviasi untuk *good governance* (X) yaitu ,503 kemudian untuk kinerja organisasi (Y) yaitu ,570. Selanjutnya *range* untuk *good governance* (X) sebesar 1 dan kinerja organisasi (Y) sebesar 2, nilai *minimum good governance* (X) sebesar 44 dan kinerja organisasi (Y) sebesar 43, dan nilai *maximum good governance* (X) yaitu 45 dan kinerja organisasi (Y) yaitu 45, dengan jumlah *sum* keseluruhan untuk *good governance* (X) sebesar 2891 dan kinerja organisasi (Y) sebesar 2883.

##### Skor Butir Pertanyaan Good Governance (X)

No.	Skor yang diperoleh	Skor ideal	Kriteria	Hitungan skor
1	290	325	Sangat Baik	Skor yang di peroleh adalah Jumlah skor setiap butir Pertanyaan  Skor ideal = nilai tertinggi x Jumlah responden (5 x 65 ) =325  Kriteria (Eko putro widoyoko, 2012:110-111) > 2.730 – 3.250 : Sangat baik >2.210 – 2.730 : Baik >1.690 – 2.210 : Cukup Baik >1.170 – 1.690 : Kurang Baik >650 – 1.170 : Sangat Kurang Baik
2	284	325	Sangat Baik	
3	285	325	Sangat Baik	
4	283	325	Sangat Baik	
5	273	325	Sangat Baik	
6	284	325	Sangat Baik	
7	298	325		
8	297	325		
9	296	325		
10	301	325		
Σ	2891	3250	Sangat Baik	
<b>X</b>	<b>(289)</b>	<b>(325)</b>	<b>Sangat Baik</b>	

Dilihat pada tabel tersebut bahwa secara keseluruhan *good governance* pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo termasuk dalam kriteria sangat baik dengan nilai rata-rata 289.

**Skor Butir Variabel Kinerja Organisasi (Y)**

No.	Skor yang diperoleh	Skor ideal	Kriteria	Hitungan skor
1	285	325	Sangat Baik	Skor yang di peroleh adalah Jumlah skor setiap butir Pertanyaan  Skor ideal = nilai tertinggi x Jumlah responden (5 x 65 ) = 325  Kriteria (Eko putro widoyoko, 2012:110-111) > 2.730 – 3.250: Sangat baik >2.210 – 2.730 : Baik >1.690 – 2.210 : Cukup Baik >1.170 – 1.690 : Kurang Baik >650 – 1.170 : Sangat Kurang Baik
2	284	325	Sangat Baik	
3	282	325	Sangat Baik	
4	280	325	Sangat Baik	
5	273	325	Sangat Baik	
6	285	325	Sangat Baik	
7	299	325	Sangat Baik	
8	300	325	Sangat Baik	
9	292	325	Sangat Baik	
10	303	325	Sangat Baik	
Σ	2883	2350	Sangat Baik	
Y	(288)	(235)	<b>Sangat Baik</b>	

**Analisis Statistik Infrensial**

**a. Uji Korelasi**

**Correlations**

		Good governance (X)	Kinerja organisasi (Y)
Good governance (X)	Pearson Correlation	1	-.107
	Sig. (2-tailed)		.396
	N	65	65
Kinerja organisasi (Y)	Pearson Correlation	-.107	1
	Sig. (2-tailed)	.396	
	N	65	65

Berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan nilai koefisien yang bernilai positif yang menunjukkan hasil positif yang berarti bahwa terjadi hubungan positif dalam arti setiap peningkatan *good governance* maka kinerja organisasi pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo yang bisa menjadi baik.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.107 <sup>a</sup>	.011	-.004	.57214

a. Predictors: (Constant), Good governance (X)

Besarnya koefisien determinasi *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo, yaitu sebesar  $0,107^2 \times 100 = 1,14\%$  sedangkan koefisien determinasi variabel lain Terhadap Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Sosial Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini adalah  $100\% - 1,74\% = 98,86\%$ , sedangkan nilai *std. Error of the estimate* sebesar 0,572.

### Coefficients

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49.755	6.320		7.873	<.001
	Good governance (X)	-.121	.142	-.107	-.855	.396

a. Dependent Variable: Kinerja organisasi (Y)

Berdasarkan tabel diatas, koefisien regresi dimana  $y = a + bx$  atau  $y = 49,775 + 0,121x$ , jika  $x = 0$  maka  $y = 49,775$  yang artinya setiap nilai *good governance* yang naik sebesar 1 satuan, maka kinerja organisasi akan meningkat sebesar 49,775 satuan (berpengaruh positif).

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.239	1	.239	.731	.396 <sup>b</sup>
	Residual	20.622	63	.327		
	Total	20.862	64			

a. Dependent Variable: Kinerja organisasi (Y)

b. Predictors: (Constant), Good governance (X)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerapan *Good Governance* pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo sudah mencapai nilai ideal dan berada dalam kriteria yang sangat baik.
2. Kinerja organisasi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo sudah mencapai nilai ideal dan berada dalam kategori sangat baik.
3. Penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo.

## Saran

1. Bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo dalam melaksanakan *good governance* untuk meningkatkan kinerja organisasi dan diharapkan untuk terus melaksanakan strategi tersebut dengan memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam melaksanakan pelayanan.
2. Kepada staf pada Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Wajo untuk meningkatkan keahliannya dibidangnya masing-masing.
3. Kepada para peneliti, agar kiranya dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mendalami faktor-faktor yang sehubungan dengan *good governance* dan kinerja organisasi yang belum dikeluarkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Armosudiro, P. (2006). *Organisasi dan manajemen*. Bumi Aksara.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi sektor publik di Indonesia (Edisi pertama)*. BPFE.
- Billah. (2001). *Workshop and seminar on good governance (kerjasama Utrecht University dan Airlangga University)*. Surabaya.
- Delly, M. (2013). *Birokrasi pemerintahan*. Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Efendi, S., & Singarimbun, M. (1989). *Metode penelitian survey*. LP3ES.
- Kaloh, J. (2010). *Kepemimpinan kepala daerah (Cetakan kedua)*. Sinar Grafika.
- Kooiman, J. (Ed.). (1993). *Modern governance: New government-society interactions*. Sane Publications.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ke-2)*. Penerbit UUP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. (2006). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia*. PT. Refika Aditama.
- Ruky, S. A. (2001). *Sistem manajemen kinerja: Panduan praktis untuk merancang dan meraih kinerja prima*. Gramedia.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. CV Mandar Maju.

- Sedarmayanti. (2011). Tata kerja dan produktivitas kerja: Suatu tinjauan dari aspek ergonomi atau kaitan antara manusia dengan lingkungan kerjanya (Cetakan ketiga). Mandar Maju.
- Setyawan, A. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Gaya Media.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). Metode penelitian survei (Editor). LP3ES.
- Soebandi, B. (2006). Desentralisasi dan tuntutan penataan kelembagaan daerah. Penerbit Humaniora.
- Sugiyono. (2006). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Surjadi. (2009). Pengembangan kinerja pelayanan publik. PT. Refika Aditama.
- UNDP. (1997). Governance for suitable development: A policy document. UNDP.
- Widoyoko, E. P. (2012). Teknik penyusunan instrumen penelitian. Pustaka Pelajar.
- Yeremias, T. K. (1995). Indikator kinerja pemda, pendekatan manajemen dan kebijakan. Fisip UGM.